

**ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN  
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2010-2016**

***ANALYSIS THE GROWTH OF MOTOR VEHICLE TAX, EXCISE FOR  
TRANSFERRING OWNERSHIP OF MOTOR VEHICLE, AND MOTOR  
VEHICLE FUEL TAX, AND THEIR CONTRIBUTION TO REGIONAL  
INCOME IN SLEMAN  
PERIOD OF 2010-2016***

**Christina Siwi Maharani**

*Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*

*christi.siwi@gmail.com*

**Dra. Isroah, M.Si**

*Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*

**Abstrak:** Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan efektivitas pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), serta kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016. Penelitian ini menggunakan analisis pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan analisis *trend*. Hasil analisis menunjukkan ketiga pajak tersebut mengalami pertumbuhan yang cenderung positif pada tahun 2010 sampai 2014 dan pada tahun tertentu mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan negatif terjadi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2016. Rasio efektivitas menunjukkan nilai rata-rata di atas 100% yang artinya kinerja pemungutan pajak telah sangat efektif. Namun bagi hasil ketiga pajak tersebut belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman.

**Kata kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Pendapatan Daerah

**Abstract:** *Analysis The Growth Of Motor Vehicle Tax, Excise For Transferring Ownership Of Motor Vehicle, And Motor Vehicle Fuel Tax, And Their Contribution To Regional Income In Sleman Period Of 2010-2016. This study aims to determine the growth and effectiveness of Motor Vehicle Tax (PKB), Excise for Transferring Ownership of Motor Vehicle (BBN-KB), and Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB), as well as the contribution of tax revenue to the regional income of Sleman regency the period of 2010 to 2016. This research used growth analysis, effectiveness analysis, contribution analysis, and trend analysis. The results show that have positive growth and in certain year experienced negative growth in 2010 to 2014. Negative growth occurs in Excise for Transferring Ownership of Motor Vehicle (BBN-KB) in 2015 and Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB) in 2016. The effectiveness ratio shows an average value above 100% which means that tax collection performance has been very effective. However, the revenue share of these three taxes has not been able to contribute significantly to regional revenue growth in Sleman Regency.*

**Keywords:** *Motor Vehicle Tax, Excise for Transferring Ownership of Motor Vehicle, and Motor Vehicle Fuel Tax, Local Tax, Regional Income*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat diupayakan dalam rangka meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Tujuan dari hal ini untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur serta mengurus segala urusan pemerintah daerahnya. “Hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah adanya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD. Pada saat ini, daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah” (Mardiasmo, 2004: 12).

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang dikatakan penting untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah

otonom dengan peran pajak daerah yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan daerah. Hal ini dibuktikan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak provinsi masuk ke dalam lima penerimaan terbesar dalam APBD tahun anggaran 2016. Pajak Kendaraan Bermotor berada di urutan kedua dengan jumlah Rp604.385.073.800,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di urutan ke lima sebesar Rp368.991.842.000,00, tiga pendapatan lain yang terbesar yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus non-fisik, dan dana otonomi khusus (APBD, 2016). Namun dua pajak penyumbang pendapatan asli daerah tersebut belum secara optimal mengurangi ketergantungan sumber Pendapatan Daerah dari pemerintah pusat. Pajak provinsi tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang kemudian dibagihasilkan ke kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten menerima dana bagi hasil daerah tersebut dalam pendapatan lain-lain yang sah yang berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kotamadya dan empat kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk

terbanyak dengan 32% dari keseluruhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 (BPS, 2018) dan memiliki jumlah kendaraan terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 589.786 tahun 2015 (DPPKAD DIY, 2018). Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman setengah dari jumlah penduduk. Mobilitas kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman relatif tinggi dilihat dari banyaknya universitas yang ada dan menyebabkan penambahan kendaraan dari luar daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk di Kabupaten Sleman akan diimbangi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Jumlah penduduk yang meningkat akan diiringi peningkatan kebutuhan akan transportasi. Ria dan Legowo (2010) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor tidak hanya sebagai sarana transport, tetapi juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah. Keberadaan kendaraan menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain karena kebutuhan, kepemilikan kendaraan bermotor tersebut menjadi salah satu alat ukur derajat seseorang di masyarakat, sehingga masyarakat menunjukkan kelas dan perekonomian keluarganya dengan kepemilikan kendaraan bermotor, baik kuantitas maupun harganya. Dari hal-hal tersebut maka permintaan akan kendaraan

bermotor akan semakin meningkat. Peningkatan permintaan kendaraan bermotor tersebut diimbangi dengan penurunan harga dari kendaraan bermotor dan penawaran kredit motor yang mudah dan murah. Beberapa alasan tersebut membuat masyarakat akan semakin mudah dalam memperoleh kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman akan menjadikan penerimaan pajak daerah itu dikatakan potensial.

Penilaian potensi pajak sebagai penerimaan daerah memerlukan beberapa kriteria diantaranya kecukupan dan elastisitas, biaya harus sebanding dengan pendapatan yang diterima, keadilan dan beban pengeluaran pemerintah ditanggung semua golongan (Davey, 1988, 40 – 47). Pajak daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang memadai. Potensi yang memadai bisa dilihat dari kecukupan dan elastisitas.

Kriteria kecukupan memiliki arti pajak yang diterima harus cukup besar untuk membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan. Sedangkan elastisitas memiliki dua arti penting, ada pertumbuhan potensi dari dasar dikenakan pajak itu (basis pajak) dan kemudahan untuk menarik manfaat dari

pertumbuhan pajak tersebut (Raksaka Mahi, 2005). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat peningkatan tarif dari pajak-pajak daerah. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dari paling tinggi 5% menjadi paling tinggi 10%, dan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu dari paling tinggi 10% menjadi paling tinggi 20%. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga kendaraan Pemerintah. Elastisitas dalam artian terdapat pertumbuhan potensi basis pajak ditunjukkan dengan perluasan basis pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Elastisitas dalam artian lain yaitu kemudahan dalam menarik manfaat terhadap pertumbuhan pajak yang terjadi. Peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan data dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan diantaranya tahun 2013 sebanyak 1.141.733, 2014 sebanyak 1.154.501, dan 2015 sebanyak 1.167.481 (BPS, 2018). Peningkatan jumlah penduduk tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah

kendaraan yaitu 2012 sebanyak 516.114, 2013 sebanyak 548.894, 2014 sebanyak 532.549, dan 2015 sebanyak 589.786 (DPPKA DIY, 2018). Dalam data tersebut jumlah kendaraan bermotor meningkat, dengan demikian sudah selayaknya penerimaan pajak terkait kendaraan bermotor juga akan meningkat. Walaupun begitu, kenaikan akan penerimaan pajak tersebut tidak akan terasa jika sistem perpajakan tidak dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut (misalnya sistem perpajakan yang tidak efektif). Dari data tersebut, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak telah mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan, penurunan tersebut juga akan berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penurunan jumlah kendaraan bermotor dalam artian kendaraan yang telah mendaftarkan dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor menurun sebesar 16.170 sedangkan bea balik nama sebesar 175.

Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terjadi akan dianggap memiliki potensi yang baik jika manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut dapat diambil dengan mudah. Sistem

perpajakan yang diterapkan oleh daerah bisa dijadikan dasar penilaian yang mencerminkan potensi daerah, seberapa efektif sistem perpajakan tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan pajak yang terjadi. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bagi kabupaten tercermin dari dana bagi hasil pajak dari provinsi. Kabupaten Sleman akan menerima penerimaan pajak tersebut melalui dana bagi hasil pajak daerah provinsi ke kabupaten. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta penjelasan yang lebih rinci di Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa dana bagi hasil pajak daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% dibagikan ke kabupaten/kota, dari 30% yang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan dibagikan sebesar 70%. Jadi walaupun penerimaan pajak Kabupaten Sleman dikatakan potensial hasil penerimaan akan tetap tergantung pada provinsi dan potensi dari Kabupaten Sleman.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini mengambil data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Sleman. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA). Objek penelitian ini yaitu laporan penerimaan pajak daerah, penerimaan pendapatan asli daerah DIY, proporsi bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/ kota. Objek penelitian telah mencakup pajak daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

### **Data dan Teknik Pengumpulan**

#### **Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi

Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2010 sampai dengan 2016, laporan penerimaan pajak daerah, penerimaan pendapatan asli daerah DIY, proporsi bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/ kota.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder melalui catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti yaitu kantor BKAD Sleman dan DPPKA DIY.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan yaitu analisis pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis kontribusi dan analisis *trend*.

### Analisis Pertumbuhan Pajak

Menurut Halim (2004 : 163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode.

Tabel 1. Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil

30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007: 291)

### Analisis Efektivitas

Efektivitas Pajak Daerah merupakan perhitungan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah, dengan penghitungan antara realisasi dan target penerimaan pajak daerah.

Nilai efektivitas menurut Mahmudi (2016: 142) dikategorikan sebagai:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
=100%	Efektif
90-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
Kurang dari 75%	Tidak efektif

### Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak daerah tersebut merupakan sumbangan yang diberikan berupa uang atau yang lainnya kepada daerah sesuai peraturan Undang-Undang untuk membiayai rumah tangga daerah.

Tabel 3. Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
> 50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2004:163)

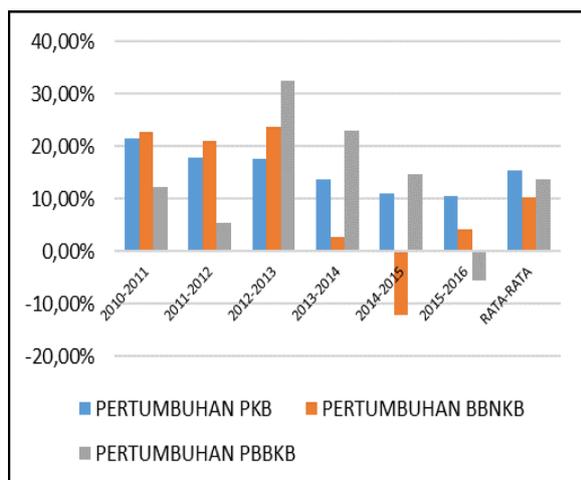
### Analisis Trend

Analisis *trend* dilakukan dengan mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu (Mahmudi, 2016: 91).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis pertumbuhan pajak

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian.



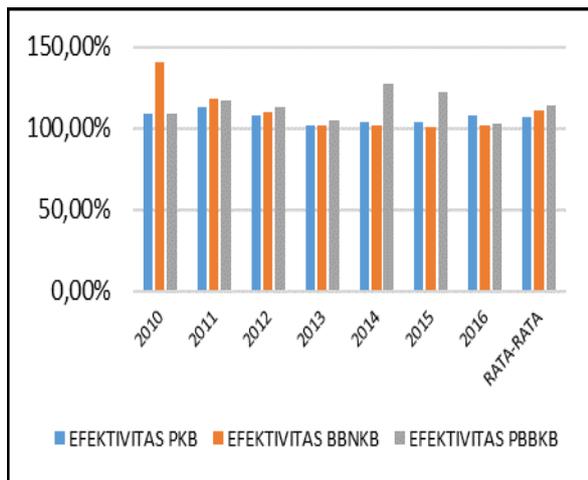
Gambar 1. Pertumbuhan Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB Kabupaten Sleman Tahun 2010 – 2016

Berdasarkan gambar 1, Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2010 Sampai 2016 mengalami pertumbuhan positif dan negatif. Pertumbuhan positif secara keseluruhan yaitu tahun 2010 sampai 2016 terjadi pada pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kedua pajak lain mengalami pertumbuhan negatif pada tahun tertentu. Bea balik nama kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2015 dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan yang negatif tahun 2016.

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2010 Sampai 2016 tertinggi terjadi pada pajak kendaraan bermotor. Rata-rata tertinggi pada pajak kendaraan bermotor terjadi karena pertumbuhan positif setiap tahun, walaupun laju pertumbuhan selalu berkurang setiap tahun.

### Analisis efektivitas pajak

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.



Gambar 2. Efektivitas Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB Kabupaten Sleman Tahun 2010 – 2016

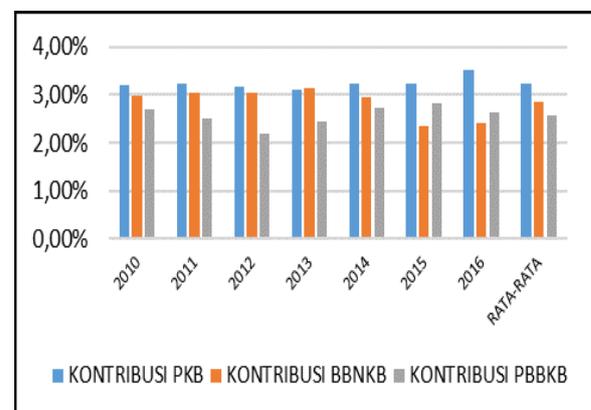
Berdasarkan gambar 2, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 rata-rata telah melebihi 100%. Rata-rata tertinggi terjadi pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tingkat efektivitas 113% dengan efektivitas yang fluktuatif setiap tahun.

Tingkat efektivitas tertinggi ada pada bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2010 sebesar 140%. Tahun 2010 merupakan tahun pertama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat peningkatan tarif dari pajak-pajak daerah. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dari paling tinggi 5% menjadi paling tinggi 10%, dan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu dari paling tinggi 10% menjadi paling tinggi 20%. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga kendaraan Pemerintah. Peningkatan tarif dan perluasan pajak yang tertera pada Undang-Undang yang baru diberlakukan menunjukkan efektivitas yang tinggi.

### Analisis Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Daerah

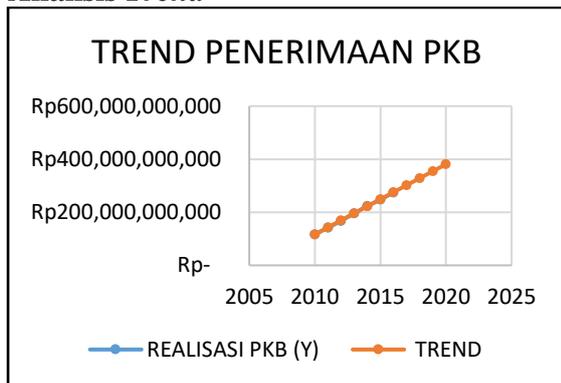
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak provinsi akan diukur kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan jumlah dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten dibandingkan dengan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman.



Gambar 3. Kontribusi Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 – 2016

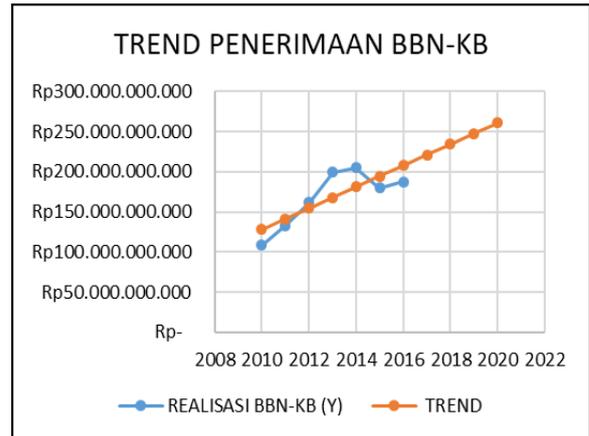
Kontribusi berdasarkan kriteria kontribusi Halim (2004:163), menyatakan bahwa tingkat kontribusi Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 tergolong sangat kurang. Rata-rata tertinggi kontribusi terjadi pada pajak kendaraan bermotor sebesar 3,25 %.

**Analisis Trend**



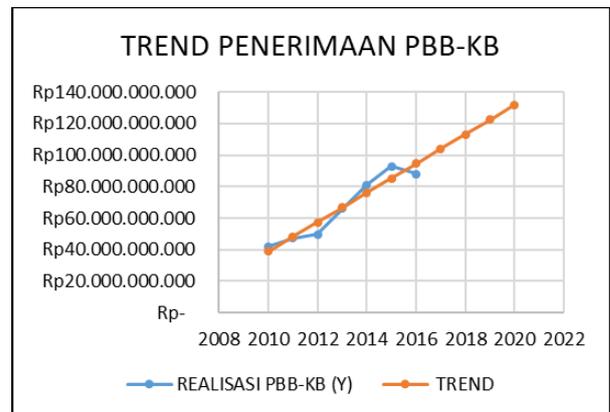
Gambar 4. *Trend* Penerimaan PKB Kabupaten Sleman

Berdasarkan gambar 4 *trend* penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Sleman sesuai dengan garis *trend*. *Trend* penerimaan pajak kendaraan bermotor cenderung naik setiap tahun.



Gambar 5. *Trend* Penerimaan BBN-KB Kabupaten Sleman

Gambar 5 menunjukkan trend penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman dibandingkan dengan garis trend. Realisasi penerimaan pajak tersebut cenderung fluktuatif.



Gambar 6. *Trend* Penerimaan PBB-KB Kabupaten Sleman

Berdasarkan gambar 6 *trend* penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sesuai dengan garis *trend*. *Trend* penerimaan pajak kendaraan bermotor cenderung naik namun turun pada tahun 2016.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang cenderung positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman mampu meningkatkan pertumbuhan ketiga pajak tersebut dengan baik. Namun pada tahun 2015, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang negatif atau mengalami penurunan, yaitu sebesar -12,21% dari tahun sebelumnya. Di tahun yang berbeda, hal yang sama juga terjadi pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,52% pada tahun 2016.
2. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 hingga tahun 2016 sebesar 15,34%. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10,31% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 13,71%.

3. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah sangat efektif, dimana rasio realisasi penerimaan ketiga pajak tersebut selalu berada di atas 100%, artinya realisasi penerimaan ketiga pajak tersebut selalu lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari tahun 2010 hingga tahun 2016, besarnya rasio efektivitas pemungutan ketiga pajak tersebut cenderung fluktuatif setiap tahunnya.
4. Bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang belum signifikan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sleman. Besarnya rasio kontribusi ketiga pajak tersebut masih berkisar 2-3% untuk setiap tahunnya. Besarnya rasio kontribusi ketiga pajak tersebut mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung menurun, namun besarnya bagi hasil ketiga pajak tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas pemungutan pajak-pajak tersebut sudah sangat efektif. Sedapat mungkin pemerintah mempertahankannya dengan melakukan pendekatan dan penyuluhan agar masyarakat tertib membayar pajaknya dan dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.
2. Tingkat pertumbuhan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor tahun 2010 sampai 2016 mengalami pertumbuhan yang positif namun untuk pajak bahan bakar kendaraan tahun 2015 dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif. Sebaiknya pemerintah daerah melakukan evaluasi mengenai pajak-pajak yang mengalami pertumbuhan negatif.
3. Penelitian ini melakukan penilaian pajak daerah sebagai penerimaan daerah menggunakan kriteria elastisitas berdasarkan Davey (1988). Davey juga mengungkapkan tiga kriteria lain yaitu biaya harus sebanding pendapatan yang diterima, keadilan, dan beban pengeluaran pemerintah ditanggung semua golongan. Penelitian selanjutnya

sebaiknya menelaah lebih lanjut tiga kriteria lain yang disebutkan Davey.

4. Penelitian ini tidak memaparkan lebih detail mengenai masing-masing jenis kendaraan bermotor, jumlah, maupun penerimaan pajaknya. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan setiap karakteristik jenis kendaraan, termasuk jumlah dan penerimaan pajak setiap jenis kendaraan.
5. Penelitian ini hanya bersifat kuantitatif berdasarkan angka-angka dari penerimaan pajak, aspek-aspek lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak secara kualitatif tidak disertakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak sebagai pendukung dari besarnya hasil penerimaan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J .1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahi, R. (2005). *Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi*. Jurnal

Ekonomi dan Pembangunan  
Indonesia, VI(01), 39-49.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah edisi  
ke 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan  
Manajemen Keuangan Daerah edisi  
2. Yogyakarta : Andi.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun  
2011 tentang pajak daerah

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016  
tentang pengelolaan bantuan  
keuangan daerah dan tata cara bagi  
hasil pajak daerah..